

Nama : Dinda Purnama

NPM : 2213031050

Kelas : B

STUDI KASUS PERTEMUAN 12 EKONOMI INDUSTRI

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai eksportir bahan mentah dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengekspor bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha mengubah posisi dalam GVC, dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi, lewat kebijakan hilirisasi industri, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

Pertanyaan:

1. Analisis Konteks:

- a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?

Jawaban:

Posisi Indonesia dalam Global Value Chains (GVC) memiliki sejumlah kelebihan yang berakar pada kekayaan sumber daya alam (SDA) dan potensi pasar domestik yang besar. Kelebihan utama Indonesia ialah ketersediaan komoditas strategis seperti nikel, bauksit, batu bara, kelapa sawit, dan karet, yang menjadikannya pemasok penting bagi industri global, terutama sektor baja, baterai kendaraan listrik, energi, dan pangan. Peran sebagai pemasok bahan mentah memberikan arus ekspor stabil, menciptakan lapangan kerja di sektor hulu, dan menarik investasi asing yang bergantung pada pasokan SDA tersebut. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional memperkuat perannya sebagai bagian dari rantai pasok global.

Namun, kelebihan ini dibarengi dengan kekurangan struktural yang signifikan. Indonesia berada pada “*low value segment*” dalam GVC tahapan produksi yang bernilai tambah rendah. Ketergantungan pada ekspor bahan baku membuat Indonesia menerima margin keuntungan kecil dibanding negara-negara yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk bernilai tinggi seperti baterai lithium-ion, baja tahan karat, atau produk turunan sawit. Selain itu, sektor hulu yang dominan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Struktur industri domestik yang belum matang ditambah keterbatasan teknologi, kemampuan inovasi, dan kualitas SDM membuat Indonesia sulit naik ke segmen produksi bernilai tambah tinggi.

- b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?

Jawaban:

Indonesia belum memperoleh nilai tambah optimal dalam GVC karena beberapa faktor fundamental. Pertama, kapasitas industri pengolahan masih terbatas, sehingga sebagian besar komoditas dieksport dalam bentuk mentah atau setengah jadi tanpa proses yang menciptakan nilai tinggi. Kedua, keterbatasan teknologi dan inovasi membuat perusahaan domestik sulit bersaing dalam aktivitas GVC yang bernilai tinggi seperti manufaktur presisi, rekayasa material, desain produk, dan branding. Ketiga, kualitas infrastruktur dan logistik yang belum efisien menyebabkan biaya produksi tinggi, sehingga perusahaan lebih memilih mengeksport bahan mentah daripada mengolahnya di dalam negeri.

Faktor lainnya adalah insentif ekonomi global yang selama ini tidak mendorong industrialisasi domestik. Perusahaan multinasional lebih memilih memproses bahan baku Indonesia di negara dengan teknologi dan ekosistem industri yang lebih maju. Sementara itu, dari sisi kebijakan, selama bertahun-tahun Indonesia belum konsisten mendorong industrialisasi hilir secara komprehensif, sehingga tidak terbentuk klaster industri kuat yang dapat menyerap dan mengolah bahan mentah secara besar-besaran. Terakhir, ketergantungan pada mitra dagang tertentu membuat Indonesia berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dalam rantai nilai global.

2. Evaluasi Kebijakan:

- a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.

Jawaban:

Kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih nikel, berpotensi kuat untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC apabila dilakukan secara konsisten dan didukung ekosistem industri yang memadai. Dari sisi ekonomi, larangan ekspor memaksa industri untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri sehingga nilai tambah yang sebelumnya dinikmati negara lain kini diperoleh Indonesia. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat struktur industri domestik, dan mempercepat transfer teknologi melalui masuknya investasi smelter serta pabrik katoda/baterai.

Namun, dari sudut geopolitik, kebijakan ini menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang yang selama ini mengandalkan pasokan bahan mentah Indonesia. Larangan ekspor bijih nikel membuat negara seperti Uni Eropa kehilangan sumber bahan baku murah untuk industri baja dan baterai mereka. Posisi Indonesia yang menutup akses bahan mentah dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas, sehingga memicu gugatan di WTO. Secara geopolitik, negara-negara maju juga khawatir bahwa kebijakan Indonesia dapat menggeser pusat produksi global sehingga berusaha menekan Indonesia melalui jalur diplomasi atau regulasi perdagangan.

- b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?

Jawaban:

Hilirisasi berdampak langsung pada hubungan dagang Indonesia, terutama dengan negara-negara yang selama ini mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Beberapa mitra dagang melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang mengganggu stabilitas rantai pasok global. Gugatan Uni Eropa di WTO merupakan contoh nyata ketegangan tersebut. Selain itu, negara-negara importir bisa mencari sumber alternatif atau membentuk aliansi baru untuk mengurangi ketergantungan

pada Indonesia, yang berpotensi mengurangi pengaruh strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Meski begitu, bagi negara yang ingin masuk ke industri hilir Indonesia, kebijakan ini justru meningkatkan daya tarik investasi karena menjamin pasokan bahan baku murah di dalam negeri. Tiongkok dan Korea Selatan, misalnya, mempercepat investasi pada smelter nikel dan industri baterai di Indonesia sebagai respons langsung terhadap kebijakan hilirisasi. Artinya, dampak kebijakan ini beragam: ada yang memperkuat hubungan ekonomi, ada pula yang memicu gesekan diplomatik.

3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawaban:

Sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang paling efektif adalah menggabungkan industrialisasi hilir dengan diplomasi ekonomi proaktif. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan hilirisasi yang lebih fleksibel dan terukur, misalnya dengan membuat periode transisi sebelum larangan ekspor total, sehingga mitra dagang dapat menyesuaikan struktur industri mereka. Kedua, pemerintah perlu menawarkan kemitraan industri jangka panjang kepada negara-negara mitra melalui skema *joint venture*, transfer teknologi, atau perjanjian investasi yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, negara mitra tidak hanya kehilangan akses bahan mentah, tetapi justru memperoleh peluang baru berpartisipasi dalam industri bernilai tambah Indonesia.

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat daya saing industri domestik melalui investasi infrastruktur logistik, riset material, pengembangan SDM, dan insentif teknologi bersih. Hal ini memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga mendorong perusahaan lokal naik kelas. Keempat, Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi multilateral untuk menjelaskan bahwa hilirisasi adalah strategi pembangunan legal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nasional, bukan bentuk proteksionisme yang merugikan pasar global.

Terakhir, strategi jangka panjang harus mencakup diversifikasi pasar dan peningkatan posisi tawar Indonesia dalam GVC global. Dengan kombinasi ini hilirisasi yang pintar, diplomasi yang efektif, dan penguatan daya saing domestik Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar tanpa merusak hubungan dagang maupun memicu konflik dengan mitra internasional.